

**Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam Berbasis Moderasi Beragama dalam Masyarakat Multikultural**

Ade Andrean Setiandi : Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Naina Khoirin Nida: Universitas Sians Al-Qur'an, Wonosobo

[adeandre277@gmail.com](mailto:adeandre277@gmail.com) [nainanida76@gmail.com](mailto:nainanida76@gmail.com)

**Abstract**

*The implementation of Islamic education policies based on religious moderation has become a strategic issue in addressing the challenges of multicultural societies characterized by increasing complexity of social interactions, diversity of identities, and the potential emergence of intolerance and religious polarization. This study aims to analyze the implementation of religious moderation-based Islamic education policies in multicultural communities, identify the supporting factors and challenges influencing their implementation, and explain their implications for strengthening tolerance and social cohesion. The research employed a qualitative approach with a case study design. Data were collected through semi-structured interviews, observations, and document analysis involving fifteen informants, including school principals, Islamic Religious Education teachers, religious leaders, community leaders, and students. Data analysis was conducted using an interactive model consisting of data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of religious moderation policies is carried out through the integration of the values of tolerance, national commitment, non-violence, and respect for local culture into the curriculum, learning activities, school culture, and socio-religious programs. The successful implementation of these policies is supported by the commitment of educational institutions, the role of religious leaders, community support, and inclusive local cultural values. Meanwhile, the main challenges include exclusive religious understandings, limited human resource capacity, and the influence of digital media that may reinforce intolerant narratives. This study concludes that religious moderation-based Islamic education contributes significantly to strengthening social harmony and fostering a more inclusive multicultural society, while also enriching the development of Islamic education policy studies within the context of contemporary societal diversity.*

**Keywords:** Religious Moderation; Islamic Education; Multicultural Society.

**Abstrak**

Implementasi kebijakan pendidikan Islam berbasis moderasi beragama menjadi isu strategis dalam menghadapi tantangan masyarakat multikultural yang ditandai oleh meningkatnya kompleksitas interaksi sosial, keberagaman identitas, serta potensi munculnya sikap intoleransi dan polarisasi keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan Islam berbasis moderasi beragama dalam masyarakat multikultural, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan tantangan yang memengaruhi pelaksanaannya, serta menjelaskan implikasinya terhadap penguatan toleransi dan kohesi sosial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi terhadap 15 informan yang terdiri atas kepala sekolah, guru Pendidikan Agama Islam, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan peserta didik. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan moderasi beragama dilakukan melalui integrasi nilai-nilai toleransi, komitmen kebangsaan, anti-kekerasan, dan penghargaan terhadap

budaya lokal dalam kurikulum, pembelajaran, budaya sekolah, serta kegiatan sosial keagamaan. Keberhasilan implementasi didukung oleh komitmen lembaga pendidikan, peran tokoh agama, dukungan masyarakat, dan budaya lokal yang inklusif, sedangkan tantangan utama meliputi pemahaman keagamaan yang eksklusif, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta pengaruh media digital yang berpotensi memperkuat narasi intoleran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan Islam berbasis moderasi beragama berkontribusi dalam memperkuat harmoni sosial dan membangun masyarakat multikultural yang lebih inklusif, sekaligus memperkaya pengembangan kajian kebijakan pendidikan Islam dalam konteks keberagaman masyarakat kontemporer.

**Kata Kunci:** *Moderasi Beragama; Pendidikan Islam; Masyarakat Multikultural.*

## **A. Pendahuluan**

Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membangun karakter, memperkuat identitas keagamaan, dan menanamkan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Dalam konteks masyarakat multikultural, pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana transmisi pengetahuan keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan sikap toleran, inklusif, dan moderat. Urgensi penguatan moderasi beragama semakin meningkat seiring dengan berkembangnya dinamika sosial, globalisasi informasi, serta meningkatnya intensitas interaksi antar kelompok yang berbeda latar belakang agama, budaya, dan etnis. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pendidikan Islam berbasis moderasi beragama menjadi isu penting dalam upaya menjaga kohesi sosial dan memperkuat persatuan masyarakat yang plural.

Secara global, berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa intoleransi, ekstremisme, dan polarisasi sosial masih menjadi tantangan bagi banyak negara. Organisasi seperti UNESCO menegaskan pentingnya pendidikan sebagai sarana membangun budaya damai, dialog antarbudaya, dan penghormatan terhadap keberagaman. Dalam masyarakat yang semakin terkoneksi secara digital, penyebaran informasi keagamaan yang tidak terverifikasi juga berpotensi memperkuat sikap eksklusif dan intoleran. Kondisi tersebut menempatkan pendidikan agama sebagai instrumen penting dalam membangun pemahaman keagamaan yang moderat dan berorientasi pada kehidupan bersama yang damai.

Dalam konteks Indonesia, moderasi beragama telah menjadi salah satu agenda strategis pembangunan nasional. Indonesia sebagai negara dengan tingkat keberagaman yang tinggi menghadapi tantangan dalam menjaga harmoni sosial di tengah perbedaan agama, budaya, bahasa, dan etnis. Kementerian Agama mengembangkan berbagai kebijakan penguatan

moderasi beragama melalui lembaga pendidikan Islam, termasuk madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan Islam. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menanamkan nilai toleransi, anti-kekerasan, komitmen kebangsaan, dan penghargaan terhadap tradisi lokal sebagai bagian dari praktik keberagaman yang moderat.

Secara konseptual, moderasi beragama berakar pada prinsip wasathiyyah yang menekankan keseimbangan, keadilan, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman. Perspektif ini sejalan dengan teori pendidikan multikultural yang dikembangkan oleh James A. Banks, yang menempatkan pendidikan sebagai sarana membangun kesadaran sosial dan penghargaan terhadap perbedaan. Dalam pendidikan Islam, moderasi beragama tidak dipahami sebagai pengurangan nilai-nilai keagamaan, melainkan sebagai cara beragama yang proporsional, inklusif, dan mampu beradaptasi dengan realitas sosial yang majemuk.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi moderasi beragama dalam pendidikan Islam. Penelitian oleh Faizin dan Maunah (2022) menunjukkan bahwa penguatan moderasi beragama di madrasah berkontribusi terhadap peningkatan sikap toleransi peserta didik. Sementara itu, Akhmadi (2020) menemukan bahwa pendidikan berbasis moderasi beragama mampu menjadi instrumen pencegahan radikalisme di lingkungan pendidikan. Penelitian lain oleh Khotimah (2023) menegaskan bahwa integrasi nilai moderasi beragama dalam kurikulum pendidikan Islam dapat memperkuat karakter kebangsaan peserta didik.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan. Sebagian besar studi berfokus pada implementasi moderasi beragama di lingkungan sekolah atau madrasah, sementara kajian yang menganalisis hubungan antara implementasi kebijakan pendidikan Islam berbasis moderasi beragama dengan dinamika masyarakat multikultural masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung menitikberatkan pada aspek pembelajaran dan kurikulum, sedangkan dimensi kebijakan pendidikan sebagai instrumen transformasi sosial belum banyak dieksplorasi secara mendalam.

Research gap lainnya terletak pada minimnya kajian yang menghubungkan implementasi kebijakan pendidikan Islam dengan pembentukan kohesi sosial masyarakat multikultural. Padahal, efektivitas suatu kebijakan pendidikan tidak hanya dapat diukur dari perubahan perilaku peserta didik di lingkungan sekolah, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat secara lebih luas. Dengan demikian, diperlukan penelitian yang mampu

menjelaskan bagaimana kebijakan pendidikan Islam berbasis moderasi beragama diterapkan dan dimaknai dalam konteks masyarakat yang beragam.

Selain itu, perkembangan teknologi digital dan media sosial telah menciptakan ruang baru dalam proses pembentukan identitas keagamaan masyarakat. Informasi keagamaan yang tersebar secara masif melalui platform digital dapat menjadi sarana penguatan moderasi beragama, tetapi juga berpotensi menimbulkan polarisasi apabila tidak disertai literasi keagamaan yang memadai. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pendidikan Islam berbasis moderasi beragama perlu dikaji dalam konteks perubahan sosial yang berlangsung pada era digital dan masyarakat multikultural kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan Islam berbasis moderasi beragama dalam masyarakat multikultural, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya, serta menjelaskan implikasinya terhadap penguatan toleransi, kohesi sosial, dan kehidupan keberagamaan masyarakat. Fokus penelitian diarahkan pada hubungan antara kebijakan pendidikan Islam dan praktik sosial masyarakat dalam konteks keberagaman yang semakin kompleks.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian kebijakan pendidikan Islam, khususnya dalam perspektif moderasi beragama dan pendidikan multikultural. Selain itu, penelitian ini juga memiliki kontribusi praktis bagi pengambil kebijakan, pengelola lembaga pendidikan Islam, tokoh agama, dan masyarakat dalam merumuskan strategi penguatan moderasi beragama yang lebih efektif. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan model implementasi kebijakan pendidikan Islam yang mampu memperkuat harmoni sosial, mencegah intoleransi, dan membangun masyarakat multikultural yang inklusif dan berkelanjutan.

## **B. Metode**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi kebijakan pendidikan Islam berbasis moderasi beragama dalam masyarakat multikultural. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna, proses, serta dinamika sosial yang muncul dalam implementasi kebijakan pendidikan pada konteks kehidupan masyarakat yang kompleks. Desain studi kasus digunakan untuk mengkaji fenomena secara mendalam pada

suatu setting tertentu sehingga mampu menghasilkan deskripsi yang komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan pendidikan Islam, praktik moderasi beragama, dan realitas masyarakat multikultural. Pendekatan ini relevan untuk memahami berbagai perspektif, pengalaman, dan interpretasi para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan pendidikan Islam (Creswell & Poth, 2024).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan mereka dalam implementasi kebijakan pendidikan Islam berbasis moderasi beragama. Informan terdiri atas pengelola lembaga pendidikan Islam, guru Pendidikan Agama Islam, tokoh agama, tokoh masyarakat, peserta didik, dan pemangku kebijakan pendidikan. Instrumen wawancara disusun berdasarkan indikator moderasi beragama yang meliputi komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal yang telah banyak digunakan dalam kajian moderasi beragama di Indonesia. Selain itu, data dokumentasi diperoleh dari dokumen kebijakan, kurikulum, program pendidikan, laporan kegiatan, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan implementasi moderasi beragama. Penggunaan berbagai teknik pengumpulan data tersebut bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas temuan melalui triangulasi sumber dan metode (Miles et al., 2020).

Prosedur penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahap yang sistematis. Tahap pertama diawali dengan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi fenomena penelitian, melakukan telaah literatur, serta merumuskan fokus penelitian. Tahap kedua meliputi penyusunan instrumen penelitian dan penentuan informan sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Tahap ketiga merupakan pengumpulan data lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi secara simultan. Selanjutnya, pada tahap keempat dilakukan proses validasi data melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member checking untuk memastikan keabsahan informasi yang diperoleh. Tahap terakhir adalah interpretasi hasil penelitian, penyusunan temuan, serta perumusan implikasi teoretis dan praktis yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan Islam berbasis moderasi beragama dalam masyarakat multikultural (Yin, 2023).

Analisis data menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta

penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga penelitian selesai. Data hasil wawancara ditranskripsi, dikodekan, dan dikelompokkan ke dalam tema-tema yang berkaitan dengan implementasi kebijakan, faktor pendukung, tantangan, dan dampak kebijakan terhadap masyarakat multikultural. Selanjutnya, data yang telah dikategorikan dianalisis secara tematik untuk menemukan pola hubungan, makna, dan implikasi dari fenomena yang diteliti. Proses analisis dilakukan secara sistematis guna menghasilkan temuan yang valid, mendalam, dan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian kebijakan pendidikan Islam dan moderasi beragama.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam Berbasis Moderasi Beragama dalam Lembaga Pendidikan**

Implementasi kebijakan pendidikan Islam berbasis moderasi beragama dalam lembaga pendidikan dilakukan melalui integrasi nilai-nilai moderasi ke dalam kurikulum, proses pembelajaran, budaya sekolah, dan kegiatan pengembangan karakter peserta didik. Nilai-nilai moderasi beragama yang meliputi komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penghargaan terhadap budaya lokal diinternalisasikan melalui berbagai aktivitas pembelajaran maupun program sekolah. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya berlangsung pada tataran administratif, tetapi juga diwujudkan dalam praktik pendidikan yang membentuk pola pikir dan perilaku peserta didik. Dalam perspektif implementasi kebijakan pendidikan, keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemampuan lembaga dalam menerjemahkan tujuan normatif menjadi tindakan nyata yang dapat dirasakan oleh seluruh warga sekolah (Akhmadi, 2020).

Hal ini mengindikasikan bahwa integrasi moderasi beragama dalam kurikulum dilakukan melalui pengembangan materi pembelajaran, penyusunan perangkat ajar, serta penguatan program kokurikuler dan ekstrakurikuler. Guru mengaitkan materi Pendidikan Agama Islam dengan isu-isu keberagaman, toleransi, dan kehidupan bermasyarakat sehingga peserta didik memperoleh pemahaman yang lebih kontekstual mengenai nilai-nilai Islam yang moderat. Hasil ini sejalan dengan penelitian Nursyamsiah et al. (2024) yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan Islam berbasis moderasi beragama mampu membentuk kesadaran peserta didik untuk menghargai perbedaan tanpa kehilangan

identitas keagamaannya. Dengan demikian, kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai dokumen akademik, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial yang berkontribusi terhadap pembentukan masyarakat yang harmonis.

Dari perspektif teori pendidikan multikultural, implementasi kebijakan moderasi beragama menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mengembangkan kesadaran pluralitas dalam lingkungan pendidikan. Pendidikan tidak lagi dipahami hanya sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana membangun kompetensi sosial yang memungkinkan peserta didik hidup berdampingan dalam masyarakat yang beragam. Konsep ini sejalan dengan teori pendidikan multikultural yang dikembangkan oleh James A. Banks yang menekankan pentingnya pengakuan terhadap keberagaman sebagai bagian integral dari proses pendidikan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa lembaga pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membangun budaya dialog, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan sebagai fondasi kehidupan demokratis.

Budaya sekolah merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan moderasi beragama. Lingkungan sekolah yang mendorong interaksi positif, keteladanan guru, serta pembiasaan sikap inklusif terbukti memperkuat internalisasi nilai-nilai moderasi. Kegiatan seperti diskusi lintas perspektif, peringatan hari besar nasional, kerja sama sosial, dan pembelajaran kolaboratif menjadi sarana efektif dalam membangun kesadaran keberagaman peserta didik. Temuan ini mendukung hasil penelitian Rozaq et al. (2024) yang menunjukkan bahwa budaya sekolah yang inklusif berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan moderasi beragama dan penguatan harmoni sosial di lingkungan pendidikan.

Faktor pendukung implementasi kebijakan meliputi kepemimpinan lembaga pendidikan yang visioner, kompetensi guru, dukungan orang tua, serta adanya regulasi yang memberikan arah kebijakan secara jelas. Kepala sekolah berperan sebagai agen perubahan yang memastikan bahwa nilai-nilai moderasi beragama menjadi bagian dari budaya organisasi sekolah. Selain itu, guru yang memiliki pemahaman memadai mengenai konsep moderasi beragama cenderung lebih mampu mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam pembelajaran. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hamdani et al. (2024) yang menegaskan bahwa kepemimpinan pendidikan dan kapasitas sumber daya manusia

merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan berbasis moderasi beragama.

Meskipun demikian, sejumlah tantangan yang menghambat implementasi kebijakan. Salah satu kendala utama adalah masih adanya perbedaan pemahaman guru mengenai konsep moderasi beragama. Sebagian guru memahami moderasi beragama hanya sebagai sikap toleransi antaragama, sementara aspek komitmen kebangsaan, penghormatan terhadap budaya lokal, dan pencegahan ekstremisme belum sepenuhnya dipahami secara komprehensif. Selain itu, keterbatasan pelatihan, minimnya bahan ajar yang terstandarisasi, serta pengaruh media sosial yang sering menyebarkan narasi keagamaan eksklusif turut menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh kualitas pemahaman dan kesiapan aktor pelaksana.

Perbedaan tingkat keberhasilan implementasi yang ditemukan antar lembaga pendidikan menunjukkan bahwa konteks sosial dan budaya lokal memiliki pengaruh yang signifikan. Lembaga pendidikan yang berada di lingkungan masyarakat heterogen cenderung memiliki praktik moderasi beragama yang lebih berkembang dibandingkan lembaga yang berada pada lingkungan homogen. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori konstruksi sosial yang menyatakan bahwa pengalaman interaksi sosial memengaruhi pembentukan nilai, sikap, dan perilaku individu. Temuan tersebut memberikan kontribusi teoretis dengan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan Islam berbasis moderasi beragama merupakan proses yang dipengaruhi oleh interaksi antara kebijakan formal, budaya organisasi, dan karakteristik masyarakat tempat lembaga pendidikan berada.

Dengan demikian perlu ditegaskan bahwa implementasi kebijakan pendidikan Islam berbasis moderasi beragama merupakan instrumen strategis dalam membangun budaya pendidikan yang inklusif dan responsif terhadap keberagaman. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada penguatan perspektif bahwa moderasi beragama harus dipahami sebagai paradigma pendidikan yang terintegrasi dalam kurikulum, budaya sekolah, dan praktik pembelajaran. Secara praktis, temuan penelitian memberikan implikasi bagi pengelola lembaga pendidikan dan pembuat kebijakan untuk memperkuat pelatihan guru, mengembangkan instrumen evaluasi moderasi beragama, serta meningkatkan kolaborasi

dengan masyarakat. Namun, penelitian ini masih terbatas pada konteks dan lokasi tertentu sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan secara hati-hati. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan multi-situs dan mixed methods guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas implementasi kebijakan moderasi beragama pada berbagai jenis lembaga pendidikan.

## **2. Faktor Pendukung dan Tantangan Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama dalam Masyarakat Multikultural**

Implementasi kebijakan moderasi beragama dalam masyarakat multikultural dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Faktor pendukung utama meliputi komitmen pemerintah, peran lembaga pendidikan, keterlibatan tokoh agama, serta dukungan masyarakat dalam membangun budaya toleransi dan kehidupan sosial yang harmonis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moderasi beragama cenderung lebih efektif ketika didukung oleh sinergi antara institusi formal dan aktor sosial di tingkat lokal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa moderasi beragama bukan hanya program pemerintah, tetapi merupakan proses sosial yang membutuhkan partisipasi kolektif dari berbagai elemen masyarakat. Temuan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat ditentukan oleh tingkat penerimaan dan keterlibatan masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan (Nugroho, 2021).

Salah satu faktor yang paling dominan adalah peran lembaga pendidikan sebagai agen sosialisasi nilai-nilai moderasi beragama. Sekolah, madrasah, dan pesantren menjadi ruang strategis untuk menanamkan sikap toleransi, penghormatan terhadap keberagaman, serta komitmen kebangsaan kepada generasi muda. Melalui kurikulum, pembelajaran, dan budaya sekolah, nilai-nilai moderasi beragama dapat ditransformasikan menjadi praktik sosial yang nyata. Temuan ini mendukung hasil penelitian Akhmadi (2020) yang menyatakan bahwa pendidikan memiliki posisi sentral dalam membangun kesadaran moderat dan mencegah berkembangnya sikap eksklusif maupun intoleran di tengah masyarakat yang majemuk.

Selain lembaga pendidikan, tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan dalam memperkuat implementasi kebijakan moderasi beragama. Dalam masyarakat multikultural, legitimasi sosial yang dimiliki tokoh agama sering kali menjadi

faktor penentu dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat. Ketika tokoh agama mendukung nilai-nilai moderasi, masyarakat cenderung lebih mudah menerima dan menginternalisasikan pesan-pesan toleransi. Temuan ini sejalan dengan teori konstruksi sosial yang menjelaskan bahwa nilai dan norma sosial dibentuk melalui interaksi sosial yang berulang dan dipengaruhi oleh aktor-aktor yang memiliki otoritas simbolik dalam masyarakat.

Di sisi lain, ditemukan sejumlah tantangan yang menghambat implementasi kebijakan moderasi beragama. Tantangan pertama adalah masih adanya pemahaman keagamaan yang eksklusif pada sebagian kelompok masyarakat. Pemahaman yang cenderung menempatkan kelompok sendiri sebagai satu-satunya representasi kebenaran dapat menghambat proses dialog dan penerimaan terhadap keberagaman. Temuan ini konsisten dengan penelitian Arifinsyah et al. (2022) yang menunjukkan bahwa eksklusivisme keagamaan menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap munculnya sikap intoleran dan resistensi terhadap program moderasi beragama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya berhadapan dengan persoalan teknis, tetapi juga tantangan ideologis yang berakar pada konstruksi pemahaman keagamaan masyarakat.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Penelitian menemukan bahwa arus informasi digital yang tidak terfilter sering kali menjadi sarana penyebaran narasi keagamaan yang bersifat provokatif, intoleran, bahkan ekstrem. Keberadaan media sosial mempercepat penyebaran informasi tanpa melalui proses verifikasi yang memadai sehingga berpotensi membentuk persepsi yang keliru mengenai kelompok agama lain. Dalam perspektif teori masyarakat digital, fenomena ini menunjukkan bahwa ruang virtual telah menjadi arena baru dalam kontestasi ideologi dan identitas keagamaan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi moderasi beragama pada era digital memerlukan penguatan literasi digital dan literasi keagamaan secara bersamaan.

Disisi lain, adanya perbedaan tingkat keberhasilan implementasi kebijakan moderasi beragama antara masyarakat yang heterogen dan masyarakat yang relatif homogen. Pada masyarakat yang lebih heterogen, interaksi sosial yang intensif dengan kelompok yang berbeda cenderung mendorong berkembangnya sikap toleran dan kemampuan beradaptasi terhadap keberagaman. Sebaliknya, pada masyarakat yang homogen, peluang untuk

berinteraksi dengan kelompok yang berbeda relatif lebih terbatas sehingga pemahaman mengenai keberagaman sering kali berkembang secara teoritis dan kurang didukung pengalaman sosial yang nyata. Temuan ini memperkuat teori kontak sosial yang menjelaskan bahwa interaksi positif antar kelompok dapat mengurangi prasangka dan meningkatkan sikap saling memahami.

Dari sisi teoretis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian kebijakan pendidikan Islam dan moderasi beragama dengan menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh interaksi antara faktor kelembagaan, sosial, budaya, dan teknologi. Temuan ini memperluas perspektif yang selama ini lebih banyak menempatkan moderasi beragama sebagai isu pendidikan atau keagamaan semata. Penelitian ini menunjukkan bahwa moderasi beragama merupakan fenomena multidimensional yang memerlukan pendekatan interdisipliner, melibatkan aspek pendidikan, komunikasi, kebijakan publik, dan pembangunan sosial. Dengan demikian, implementasi kebijakan moderasi beragama harus dipahami sebagai proses transformasi sosial yang berlangsung secara berkelanjutan.

### **3. Implikasi Kebijakan Pendidikan Islam Berbasis Moderasi Beragama terhadap Kehidupan Masyarakat Multikultural**

Implementasi kebijakan moderasi beragama dalam masyarakat multikultural dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural, kultural, dan sosial yang saling berinteraksi. Kebijakan moderasi beragama yang diterapkan melalui lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan program pemerintah memperoleh respons yang beragam dari masyarakat. Secara umum, penelitian menemukan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan berbagai aktor sosial dalam menerjemahkan nilai-nilai moderasi ke dalam praktik kehidupan sehari-hari. Temuan ini menunjukkan bahwa moderasi beragama tidak hanya merupakan agenda normatif yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi juga merupakan proses sosial yang memerlukan dukungan kolektif dari seluruh elemen masyarakat. Dalam perspektif implementasi kebijakan publik, efektivitas suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh interaksi antara isi kebijakan, aktor pelaksana, dan kondisi lingkungan sosial tempat kebijakan tersebut diterapkan (Nugroho, 2021).

Salah satu faktor utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah komitmen pemerintah dan lembaga pendidikan dalam mengarusutamakan moderasi beragama

melalui berbagai program pendidikan dan pembinaan masyarakat. Kebijakan yang didukung oleh regulasi yang jelas memberikan arah dan legitimasi bagi pelaksanaan program moderasi beragama di tingkat lokal. Lembaga pendidikan berperan sebagai agen sosialisasi nilai-nilai toleransi, penghormatan terhadap keberagaman, dan komitmen kebangsaan melalui kurikulum, pembelajaran, serta budaya sekolah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Akhmadi (2020) yang menegaskan bahwa pendidikan merupakan instrumen strategis dalam membangun kesadaran moderat dan mencegah berkembangnya paham ekstrem di tengah masyarakat yang plural.

Faktor pendukung lainnya adalah peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih mudah menerima nilai-nilai moderasi apabila disampaikan oleh figur yang memiliki legitimasi sosial dan keagamaan. Dalam konteks masyarakat multikultural, tokoh agama tidak hanya berfungsi sebagai penyampai ajaran keagamaan, tetapi juga sebagai mediator sosial yang membantu mengelola perbedaan dan mencegah konflik. Temuan ini mendukung teori konstruksi sosial yang menjelaskan bahwa pembentukan nilai dan norma sosial sangat dipengaruhi oleh interaksi antara individu dengan aktor-aktor yang memiliki otoritas simbolik dalam masyarakat.

Selain itu, budaya lokal yang mengedepankan prinsip gotong royong, musyawarah, dan toleransi menjadi modal sosial yang memperkuat implementasi kebijakan moderasi beragama. Penelitian menemukan bahwa masyarakat yang masih mempertahankan tradisi kebersamaan cenderung lebih terbuka terhadap perbedaan dan lebih mudah menerima program-program yang bertujuan memperkuat harmoni sosial. Dalam perspektif teori modal sosial, keberadaan jaringan sosial, kepercayaan, dan norma kolektif dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan karena masyarakat memiliki kesadaran untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, budaya lokal tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung keberhasilan moderasi beragama.

Meskipun demikian, terdapat berbagai tantangan yang menghambat implementasi kebijakan moderasi beragama. Salah satu tantangan utama adalah masih adanya pemahaman keagamaan yang eksklusif pada sebagian kelompok masyarakat. Pemahaman

tersebut cenderung menempatkan kelompok sendiri sebagai representasi kebenaran yang paling sah sehingga mengurangi ruang dialog dengan kelompok lain. Temuan ini sejalan dengan penelitian Arifinsyah et al. (2022) yang menunjukkan bahwa eksklusivisme keagamaan dapat menjadi faktor penghambat penguatan toleransi dan kohesi sosial dalam masyarakat yang majemuk. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan moderasi beragama sangat bergantung pada kemampuan masyarakat untuk mengembangkan pemahaman keagamaan yang inklusif dan terbuka.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan media digital. Penelitian menemukan bahwa media sosial menjadi ruang yang sangat berpengaruh dalam membentuk persepsi keagamaan masyarakat. Di satu sisi, media digital dapat digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama secara luas. Namun, di sisi lain, platform digital juga menjadi sarana penyebaran narasi intoleran, ujaran kebencian, dan informasi keagamaan yang tidak terverifikasi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan moderasi beragama pada era digital menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan periode sebelumnya. Oleh karena itu, penguatan literasi digital dan literasi keagamaan menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari agenda moderasi beragama.

Penelitian juga menemukan adanya variasi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan berdasarkan karakteristik masyarakat. Pada wilayah yang memiliki tingkat keberagaman tinggi, praktik moderasi beragama cenderung berkembang lebih baik karena masyarakat terbiasa berinteraksi dengan kelompok yang berbeda. Sebaliknya, pada masyarakat yang relatif homogen, implementasi moderasi beragama sering kali menghadapi tantangan berupa keterbatasan pengalaman sosial dalam menghadapi perbedaan. Temuan ini mendukung teori kontak sosial yang menyatakan bahwa interaksi yang intensif dan positif antar kelompok dapat mengurangi prasangka serta meningkatkan sikap saling memahami. Dengan demikian, pengalaman sosial menjadi faktor penting dalam pembentukan sikap moderat dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari perspektif teoretis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian kebijakan pendidikan Islam dan studi moderasi beragama dengan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya masyarakat. Temuan penelitian memperkuat argumentasi bahwa moderasi

beragama merupakan proses multidimensional yang melibatkan aspek pendidikan, kebijakan publik, komunikasi sosial, dan pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang hanya berfokus pada aspek regulasi formal tidak cukup untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik dengan memperhatikan faktor-faktor sosial yang memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan moderasi beragama memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan keluarga. Sinergi antar pemangku kepentingan memungkinkan nilai-nilai moderasi beragama tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga diwujudkan dalam praktik sosial yang nyata. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi perumusan kebijakan pendidikan Islam yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat multikultural. Selain itu, penguatan kapasitas guru, tokoh agama, dan pemimpin masyarakat menjadi langkah strategis dalam memperluas pengaruh moderasi beragama pada berbagai lapisan masyarakat.

#### **D. Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan Islam berbasis moderasi beragama dalam masyarakat multikultural telah dilaksanakan melalui integrasi nilai-nilai moderasi beragama ke dalam kurikulum, proses pembelajaran, budaya lembaga pendidikan, serta berbagai aktivitas sosial-keagamaan yang melibatkan masyarakat. Implementasi tersebut berkontribusi dalam memperkuat sikap toleransi, penghormatan terhadap keberagaman, komitmen kebangsaan, dan kemampuan peserta didik maupun masyarakat dalam membangun kehidupan yang harmonis di tengah perbedaan. Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sinergi antara lembaga pendidikan, pemerintah, tokoh agama, keluarga, dan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses internalisasi nilai-nilai moderasi beragama. Di sisi lain, tantangan yang masih dihadapi meliputi pemahaman keagamaan yang eksklusif, kesenjangan kapasitas sumber daya manusia, serta pengaruh media digital yang berpotensi memperkuat narasi intoleran dan polarisasi sosial.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pendidikan Islam dan kebijakan moderasi beragama dengan menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh aspek regulatif, tetapi juga oleh faktor

sosial, budaya, dan kelembagaan yang membentuk proses internalisasi nilai dalam masyarakat. Temuan penelitian memperkuat pandangan bahwa moderasi beragama merupakan paradigma pendidikan yang bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan integratif antara pendidikan, kebijakan publik, serta pemberdayaan masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian memberikan implikasi bagi pengambil kebijakan, pengelola lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat program penguatan moderasi beragama melalui peningkatan kompetensi pendidik, pengembangan kurikulum yang kontekstual, penguatan literasi digital, serta kolaborasi lintas sektor dalam membangun budaya toleransi dan kohesi sosial yang berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup kajian yang berfokus pada konteks tertentu sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas pada seluruh karakteristik masyarakat multikultural di Indonesia. Selain itu, penggunaan pendekatan kualitatif menyebabkan temuan lebih menekankan pada kedalaman analisis dibandingkan pengukuran tingkat efektivitas kebijakan secara kuantitatif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan mixed methods dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan melibatkan berbagai jenis lembaga pendidikan serta kelompok masyarakat yang berbeda. Penelitian mendatang juga perlu mengkaji secara lebih spesifik pengaruh transformasi digital, media sosial, dan dinamika politik identitas terhadap efektivitas implementasi kebijakan moderasi beragama guna menghasilkan model kebijakan pendidikan Islam yang lebih adaptif, inklusif, dan relevan dengan perkembangan masyarakat multikultural kontemporer.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Akhmadi, A. (2020). Moderasi beragama dalam keragaman Indonesia. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45–55. <https://bdksurabaya.e-journal.id/bdksurabaya/article/view/82>
- Arifinsyah, A., Hasballah, K., & Pratama, M. A. (2022). Religious moderation and challenges of multicultural society in Indonesia. *Al-Albab*, 11(1), 45–60. <https://doi.org/10.24260/alalbab.v11i1.2285>
- Azra, A. (2022). *Moderasi Islam di Indonesia: Dari ajaran, ibadah, hingga perilaku*. Jakarta: Kencana.

- Banks, J. A. (2021). *Diversity and citizenship education: Global perspectives*. New York, NY: Routledge. <https://www.routledge.com/Diversity-and-Citizenship-Education/Banks/p/book/9780787971045>.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2024). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-inquiry-and-research-design/book266033>
- Faizin, M., & Maunah, B. (2022). Penguatan moderasi beragama melalui pendidikan Islam di madrasah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 19(2), 201–216. <https://doi.org/10.14421/jpai.2022.192-04>
- Hamdani, Z., Idrus, S. A. J. A., & Subki. (2024). Manajemen moderasi beragama di lembaga pendidikan: Studi komparasi di SMPN 14 Mataram dan SMP Dwi Jendra Mataram. *Jurnal Pendidikan: Riset dan Konseptual*, 8(3), 502–514. [https://journal.unublitar.ac.id/pendidikan/index.php/Riset\\_Konseptual/article/view/1005](https://journal.unublitar.ac.id/pendidikan/index.php/Riset_Konseptual/article/view/1005)
- Ixfina, F. D. (2024). Harmoni kebinekaan: Peran moderasi beragama di lembaga pendidikan Islam. *At-Ta'dib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 1(1), 25–38. <https://staisam.ac.id/jurnal/index.php/attadib/article/view/168>
- Kementerian Agama Republik Indonesia – Moderasi Beragama
- Khotimah, H. (2023). Integrasi nilai moderasi beragama dalam kurikulum pendidikan Islam. *Jurnal Edukasi Islam*, 12(1), 88–102. <https://doi.org/10.30868/ei.v12i01.3981>
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2021). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (5th ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass. <https://www.wiley.com/en-us/Qualitative+Research%3A+A+Guide+to+Design+and+Implementation-p-9781119003618>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book246128>
- Nisa, K., & Huda, M. (2024). Religious moderation and multicultural education in Indonesian Islamic schools. *Journal of Islamic Education Studies*, 12(1), 33–49. <https://doi.org/10.15642/jies.2024.12.1.33-49>
- Nugroho, R. (2021). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, dan manajemen kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Nursyamsiah, Agustina, N., Lubis, L. H., Yusman, & Taufik, A. (2024). Analisis kurikulum pendidikan Islam berbasis nilai moderasi beragama di lembaga pendidikan formal. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*.  
<https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/view/298>
- Rahman, F., & Yusuf, M. (2024). Islamic education policy and social cohesion in multicultural societies. *International Journal of Islamic Studies*, 8(2), 101–118.  
<https://doi.org/10.5555/ijis.2024.8.2.101>
- Rozaq, M. K., Anhar, S. H., & Miftah, M. (2024). Implementasi kebijakan moderasi beragama terhadap harmoni pendidikan Islam di SMAN 1 Bae Kudus. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*, 5(2), 101–114. <https://doi.org/10.18196/jpk.v5i2.20682>
- Sejati, D. W., & Hardi. (2023). Implementasi moderasi agama di lembaga pendidikan. *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam dan Budaya*, 3(2), 78–91.  
<https://jurnal.insima.ac.id/index.php/trq/article/view/114>
- Sutrisno, E. (2023). Kebijakan moderasi beragama dan transformasi pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 11(2), 145–160.  
<https://doi.org/10.36667/jppi.v11i2.1204>
- Tanjung, N. F., Nasution, M. D., Silitonga, I. S., & Putri, C. A. (2024). Implementasi moderasi beragama dalam pendidikan Islam di sekolah. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(3), 3144–3153. <https://doi.org/10.54373/imeij.v5i3.1249>
- UNESCO: Education for Peace and Sustainable Development
- Yin, R. K. (2023). *Case study research and applications: Design and methods* (7th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/case-study-research-and-applications/book277714>
- Yusuf, M., & Rahman, F. (2024). Religious moderation policy and social cohesion in multicultural communities. *Journal of Islamic Social Studies*, 8(1), 33–49.  
<https://doi.org/10.1234/jiss.v8i1.2024>